

# Ta'dibuna

Jurnal Pendidikan Islam

Vol. 5, No. 2, Oct 2016, p-ISSN: 2252-5793, hlm. 238-261

## **ANALISIS PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PENDANAAN YANG BERDAMPAK PADA DAYA TAMPUNG DAN PELAYANAN MADRASAH MENURUT PERSEPSI KEPALA MADRASAH: STUDI KASUS PADA MADRASAH IBTIDAIYAH DI KABUPATEN KARAWANG**

**Tajudin Nur<sup>1</sup>, Muhyani<sup>2</sup>, Didin Hafidhuddin<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

<sup>2</sup> Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

<sup>3</sup> Institut Pertanian, Bogor

### **Abstract**

Education contributes greatly to the progress of a nation and is a vehicle for translating the messages in the constitution as well as the means to build national character. Terms of regional autonomy that is based on Law No. 32 of 2004, has brought changes in many areas of life, including education. In connection with that, there is the issue of national education policies that need to be reconstructed in the frame work of regional autonomy. This is related to improve the quality of education, improving the efficiency of education management, education and increased relevance Partisipasion public service equalization is indispensable for the implementation of these improvements. This study seeks to provide an overview of community participation in funding and capacity to service pendidikandi Madrasah. This study was conducted to make use of the survey method is a method used to obtain the facts of the existing symptoms and seek factual particulars by using two forms of research is a descriptive study and verification against 134 Elementary School in Khanewal district. From the results, positive influence and signifansi community participation in financing, capacity either partially or jointly to the educational services Elementary School in Karawang district.

**keyword:** *Community Participation, Funding, Capacity and Services*

### **I. PENDAHULUAN**

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, "pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.”<sup>1</sup>.

Menurut Marimba seperti yang dikutip oleh Ahmad Tafsir, “pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani anak didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama“. Usaha secara sengaja dari orang dewasa dengan pengaruhnya untuk meningkatkan si anak ke kedewasaan, yang selalu diartikan mampu menimbulkan tanggung jawab moral dari segala perbuatannya”<sup>2</sup>. Sedangkan, menurut Zuhairini, dkk, “pendidikan dalam pengertian yang luas adalah meliputi perbuatan atau semua usaha generasi tua untuk mengalihkan (melimpahkan) pengetahuannya, pengalamannya, kecakapan serta keterampilannya kepada generasi muda, sebagai usaha untuk menyiapkan mereka agar dapat memenuhi fungsi hidupnya, baik jasmaniah maupun rohaniah.”<sup>3</sup>

Sesuai dengan kondisi sekarang, H.A.R. Tilaar mengemukakan bahwa pendidikan nasional dewasa ini sedang dihadapkan pada empat krisis pokok, yang berkaitan dengan kuantitas, relevansi atau efisiensi eksternal, elitisme dan manajemen. Lebih lanjut dikemukakan bahwa sedikitnya ada tujuh masalah pokok sistem, pendidikan nasional : (1) menurunnya akhlak dan moral peserta didik, (2) pemerataan kesempatan belajar, (3) masih rendahnya efisiensi internal sistem pendidikan, (5) status kelembagaan, (6) manajemen pendidikan yang tidak sejalan dengan pembangunan nasional, dan (7) sumber daya yang belum profesional”<sup>4</sup>.

Dengan demikian, pendidikan menyiapkan warga negara menjadi partisipan aktif dalam pembangunan bangsa dan negara. Di dalam nasionalisme atau faham kebangsaan terkandung kesadaran akan kesatuan sosial baru yang disebut bangsa, yang lingkupnya mengatasi kesatuan primordial yang lebih sempit yang didasarkan atas kesamaan agama, suku, budaya, bahasa. Di dalam wawasan kebangsaan itu terkandung unsur kewajiban moral untuk mengikat diri pada kepentingan yang lebih luas, yaitu bangsa dan Negara.

Hal yang perlu dicermati dari pembukaan sekolah/madrasah, baik negeri maupun swasta adalah bagaimana proses, perizinan dan pembinaan oleh dinas terkait mengutamakan kepentingan kelayakan prasarana dan sarana, serta kualitas proses pembelajaran yang dilakukannya, sehingga harapan masyarakat menyekolahkan anak untuk memperoleh kualitas proses dan hasil pembelajaran yang baik dapat terpenuhi.

Inilah yang diharapkan dari kandungan Allahfirman Allah Swt. dalam al-Quran guna mendidik ummat manusia yang beriman dan memerintahkan kepada mereka agar satu sama lain saling bantu dan bersikap baik di majlis ilmu. Memberi kemudahan pada kelancaran terciptanya pemberian ilmu kepada yang membutuhkan. Dalam salah satu ayat-Nya Allah Azza wa Jalla telah berfirman dalam surah Almujaadilah ayat 11:<sup>5</sup>

*Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan*

*orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Kepedulian untuk memberi kemudahan pada kelancaran terciptanya pemberian ilmu kepada yang membutuhkan sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW, seperti Sabdanya:

*Dari Alqomah bin Said bin Abdurrahman bin Abza dari Bapak , dari kakeknya, dia berkata : Pada suatu hari Rasulullah SAW berhutbahi, seraya memuji kebaikan sekelompok kaum muslimin, kemudian beliau bersabda : “Mengapa kaum itu tidak memberi pemahaman agama kepada tetangganya, tidak mengajarnya, tidak member nasihat kepada mereka, tidak mengajak kepada kebaikan dan melarang dari kejelekan. Dan mengapa kaum itu tidak mau belajar dari tetangganya, tidak mau minta pemahaman dan nasihat agama. Demi Allah, hendaklah kaum itu mengajarkan kepada tetangganya, member pemahaman, nasihat dan mengajak ke-baikan dan melarang kejelekan. Dan hendaklah sautau kaum belajar dari tetang-ganya, memahami agamanya dan minta nasihat, atau kalau tidak akan disegerakan siksaan kepada mereka”<sup>6</sup>(HR Thabrany dalam Zaghlu an-Najaar)*

Di Kabupaten Karawang, keberadaan madrasah Ibtidaiyah masih sangat timpang dibanding dengan Sekoah Dasar. Baik dari jumlah (*kuantitas*) maupun mutu (*kualitas*) sarana, prasarana dan sumber daya.

Sejak diterbitkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, posisi madrasah dalam peta pendidikan nasional semakin jelas, sebagai salah satu subsistem sistem pendidikan` nasional. Integrasi ini secara umum berdampak positif terhadap kemajuan pendidikan Islam jika dibandingkan dengan masa awal sejarahnya.

Dalam menghadapi ujian nasional, madrasah tampak masih terlihat gamang, meskipun beberapa madrasah telah menunjukkan hasil yang tidak jauh berbeda dari sekolah umum. Pantauan di lapangan terhadap penyelenggaraan UN di madrasah masih memperlihatkan kurangnya rasa percaya diri komunitas madrasah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini paling tidak terlihat dari beberapa kali *try out* siswa madrasah menjelang UN di daerah Karawang, misalnya. Hasilnya menunjukkan kurang memuaskan. Apalagi jika dilihat kenyataan bahwa sebagian besar madrasah adalah swasta, perhatian pemerintah selama ini kurang maksimal. Data statistik pendidikan agama dan keagamaan menyebutkan jumlah madrasah swasta tingkat ibtidaiah (MI/setingkat SD) adalah 98,5%; madrasah tsanawiyah (MTs/setingkat SMP) -adalah, 89,9%; dan madrasah aliyah (MA/setingkat SMA) adalah 86,9%. Persoalan lainnya adalah, meskipun madrasah sudah terintegrasi ke dalam sistem pendidikan nasional, tanggung jawab penyelenggaraannya masih berada di bawah kewenangan Kementerian Agama, salah satu kementerian yang tidak terkena dampak otonomisasi dan desentralisasi.

Kendala lain yang juga harus dihitung masyarakat madrasah untuk sukses dalam UN antara lain beban kurikulum yang berat. Sebab, madrasah mengemban dua misi pendidikan, agama Islam dan umum. Awalnya misi madrasah lebih banyak pendidikan

agama. Tetapi pemerintah Orde Baru melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri (Depdiknas, Depdagri dan Depag) pada tahun 1975, menetapkan komposisi kurikulum madrasah adalah 70% pendidikan umum dan 30% pendidikan agama. Depag juga secara terus menerus mengadakan modernisasi madrasah. Puncaknya dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, madrasah diposisikan setara dengan sekolah yang menyelenggarakan 100% kurikulum sekolah dan pada saat yang sama, tetap harus menyelenggarakan Pendidikan Agama Islam<sup>7</sup>. Hal ini mengakibatkan beban kurikulum madrasah menjadi berat. Kalau sekolah hanya, menyelenggarakan satu mata pelajaran pendidikan agama, madrasah membagi pelajaran agama Islam menjadi lima: Alquran-hadist, akidah akhlak, fikih, sejarah Islam dan bahasa Arab. Harapan masyarakat kepada madrasah untuk menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan agama cenderung besar. Sebagian orang tua bahkan menempatkan pendidikan agama sebagai alasan penting mengirimkan anaknya ke pendidikan madrasah. Padahal pemerintah di lain pihak mengharapkan madrasah juga berfungsi sebagai sekolah yang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi modern.

Sedangkan kendala lain ialah sebagian besar madrasah memiliki sumber daya serba terbatas, komposisi antara guru yang *qualified* dan *mismatched* (salah kamar) masih tinggi. Sering ditemukan bahwa, karena mayoritas jumlah madrasah adalah swasta, kemampuan para pengelola madrasah dalam mencari guru yang *qualified*, juga sangat terbatas. Tidak jarang ditemui di beberapa madrasah, meskipun telah memiliki laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam. (IPA) atas bantuan pihak Departemen Agama, tidak dibarengi dengan penyediaan tenaga atau guru yang profesional. Serba keterbatasan inilah yang juga membuat posisi madrasah sulit bersaing dengan sekolah umum lainnya.

Keterbatasan sumber daya madrasah seringkali juga diperumit oleh keberadaannya sebagai bagian dari Departemen Agama. Madrasah sering sangat memerlukan informasi penting seperti Biaya Operasional Sekolah (BOS), Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), Ujian Nasional (UN), akreditasi, sertifikasi, tetapi Departemen Agama sering terlambat dan secara samar-samar dalam menjelaskan persoalan-persoalan itu. Bahkan sering tidak ada informasi sama sekali. Situasi ini menyebabkan madrasah selalu ketinggalan informasi kalau dibandingkan dengan sekolah umum (SD yang berada di bawah naungan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan). Belum lagi masalah sikap pemerintah yang sering menerapkan perlakuan berbeda antara kepala sekolah dan kepala madrasah, seperti kasus perlakuan Pemda DKI yang memberikan dana kesejahteraan terhadap guru SD/SMP tetapi tidak untuk guru MI/MTs. Madrasah dan sekolah sesungguhnya berpijak pada rel dan landasan yang sama (UUD 1945, UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas dan peraturan perundangan lainnya).

Kendala terpenting madrasah dalam pembelajaran adalah latar belakang sosial ekonomi orang tua/siswa yang umumnya rendah. Data menunjukkan bahwa 49,03% orang tua siswa madrasah berpenghasilan tidak tetap, 18,37% kurang dari Rp. 500.000, 17,49% antara Rp. 500.000 – Rp. 1.000.000, 10,22% antara Rp. 1.000.000 – Rp. 2.000.000 dan 4,89%, lebih dari Rp. 2.000.000. Orang tua siswa umumnya pedagang

kecil, petani, nelayan, buruh dan sopir, dengan latar belakang pendidikan yang juga rendah. Sedangkan jika dilihat dari latar belakang pendidikan orang tua siswa madrasah, tercatat 7,36% tidak sekolah, 42,58% lulusan SMP, 24,29% lulusan SLTA, 20,95% lulusan diploma dan 2,59% lulusan S-1.<sup>8</sup>

Dengan status ekonomi dan pendidikan rendah, madrasah sulit mengharapkan orang tua atau keluarga siswa untuk (1) membimbing anak secara optimal dalam belajar; (2) menyediakan sarana belajar seperti komputer, internet, bacaan pengayaan seperti koran dan buku, serta (3) mendatangkan guru privat atau menegikutkan les atau bimbingan belajar. Adapun yang mungkin terjadi orang tua bersikap pesimistis terhadap manfaat pendidikan formal. Akibatnya, anak-anak memiliki motivasi yang rendah untuk belajar bahkan *drop out*.

Pendidikan didesain untuk mampu mengatasi krisis multi dimensional dengan membuat neraca mass lama, mass sekarang dan mass datang. Dalam hal ini, sekolah membutuhkan bantuan yang luas dari masyarakat dan sebaliknya, masyarakat memerlukan pendidikan agama untuk anak-anaknya. Dengan kata lain, saling membutuhkan, sehingga kekuatan dan keterbatasan masing-masing dapat saling melengkapi menjadi sebuah kekuatan efektif manajemen sekolah. Secara konseptual, implikasi otonomi pemerintahan daerah adalah meningkatkan kinerja sekolah, karena diberi ruang pemberdayaan yang memadai untuk mencapai tujuan pendidikan nasional bermutu. UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah dimaksudkan untuk menentukan pola hubungan kewenangan antara pusat dan daerah, provinsi dengan kabupaten/kota dan unit pemerintahan di bawahnya dengan prinsip desentralisasi.

Dengan keluarnya UU tersebut, masyarakat telah banyak menaruh harapan dan membicarakan manfaat kebijakan otonomi bagi kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Namun sayangnya, model otonomi semangat UU tersebut belum diterapkan secara utuh. Meskipun demikian, otonomi daerah dalam batas-batas yang dipahami mulai dilaksanakan masing-masing daerah, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang masalah ini dan akan disusun dalam penelitian berjudul :**"Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Pendanaan yang berdampak pada Daya Tampung dan Pelayanan Menurut Persepsi Kepala Madrasah "** ( Studi Kasus pada Madrasah Ibtidaiyah Di Kabupaten Karawang ).

Peneliti tertarik untuk memilih judul penelitian ini karena belum pernah ada yang meneliti. Selain itu, peneliti memilih judul tentang peningkatan keberhasilan pelayanan pendidikan Madrasah, karena Madrasah belum diotonomikan, masih dikendalikan oleh Kementerian Agama, sehingga *Spoor of Konteksnya* jauh dan kewenangan Pemda tidak ada untuk mengaturnya. Selain itu Pemda telah memberlakukan kebijakan tidak membayar uang sekolah untuk SD, SMP, tetapi Madrasah masih membayar uang sekolah, padahal anggaran pendidikan sudah 20%.

## II. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode survey yaitu suatu metode yang digunakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual.<sup>9</sup> Dengan metode survey dapat membedah, membahas, mengenal masalah-masalah dan mendapatkan pembenaran terhadap keadaan dan praktek-praktek yang sedang berlangsung, serta melakukan perbandingan-perbandingan terhadap hal-hal yang dikerjakan orang dalam menangani situasi atau masalah yang serupa dan hasilnya dapat digunakan dalam pembuatan rencana dan pengambilan keputusan di masa mendatang. Dalam metode penelitian survey, data dikumpulkan dari sampel atas populasi dan menggunakan kuisioner sebagai pengumpulan data yang pokok.<sup>10</sup>

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh madrasah ibtidaiyah diseluruh kecamatan di Kabupaten Karawang, terdiri dari tiga puluh Kecamatan dengan madrasah ibtidaiyah yang terdiri dari dua negeri dan 132 swasta

Teknik penentuan sampel dilakukan dengan teknik *cluster random sampling*. Yakni pengambilan sampel dengan cara acak, dimana setiap subyek populasi dipandang sama. Unit sampling dalam cluster random sampling menurut Soehartono ,yaitu: “Yang menjadi unit sampling dalam kerangka sampling adalah rumpun-rumpun atau kelompok-kelompok”<sup>11</sup>. Sebagian atau wakil populasi yang diteliti.<sup>12</sup> Ukuran sampel di tiap kecamatan dilakukan secara proporsional dengan tarap signifikansinya 5% sebagai dasar untuk menetapkan sampel digunakan rumus Slovin:

$$n = \frac{N}{1 + N\alpha^2}$$

Ket : n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

$\alpha$  = taraf signifikansi

Dengan menggunakan taraf signifikansinya 5% maka dihasilkan ukuran sampel sebesar 104.

Data primer yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap kegiatan madrasah Ibtidaiyah secara langsung terhadap objek yang diteliti.
2. Wawancara yaitu untuk memperoleh data secara langsung oleh responden dimana peneliti menggunakan interview langsung dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan melalui daftar pertanyaan yang telah tersusun kepada kepala sekolah, guru dan siswa. Tujuan wawancara adalah untuk melengkapi data sekaligus cross check data yang uisioner.
3. Kuesioner yaitu teknik pengumpulan data dengan cara menyebarkan kuisioner berupa daftar pertanyaan terstruktur yang diajukan pada responden yang dipilih sebagai sampel. Responden diberikan seperangkat daftar pertanyaan yang

berhubungan dengan variabel penelitian, dan responden hanya memilih salah satu dari lima alternatif jawaban yang telah disediakan.

Data primer hasil penelitian akan dianalisis dari setiap item kuesioner tersebut yang memiliki lima jawaban dengan masing-masing nilai yang berbeda berdasarkan Skala Likert dengan skala terendah 1 (satu) dan skala tertinggi 5 (lima), dengan sampel sebanyak 104 responden Kepala Masrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Karawang.

Uji kelayakan model penelitian harus dilakukan dengan landasan pemikiran sebagai berikut:

1. Model dalam disertasi ini mempunyai peran yang sangat relevan terkait dengan tujuan disertasi, yaitu menghasilkan sumbangan ilmiah/*theoretical implication* dan kegunaan praktis/*practical implication*.
2. Penyusunan model untuk menjelaskan masalah/fenomena yang diteliti, yaitu dengan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab (independent variabel) dan untuk memprediksi pengaruh perubahan variabel-variabel independen terhadap masalah yang diteliti.
3. Di dalam pengidentifikasian, peneliti menggunakan teori-teori yang telah dikembangkan sebagai postulat/premis atau hasil-hasil penelitian yang telah dibakukan.
4. Uji kelayakan suatu model untuk memastikan apakah model yang telah diestimasi memenuhi kriteria model yang layak, yaitu *theoretical plausability* (kesesuaian dengan postulat/teori), *accuracy of the estimates of the parameters*, *explanatory ability forecasting and simplicity*<sup>13</sup>

Berdasarkan keterangan tersebut, supaya dalam penelitian ini menghasilkan model dengan persyaratan penuh di atas memberikan sumbangan ilmiah dan sumbangan dalam pemecahan masalah, maka rancangan uji kelayakan model mengikuti kaidah sebagai berikut:

1. *Theoretical Plausability*/Kesesuaian dengan Teori; Apakah hipotesis-hipotesis/model pasca-estimasi sesuai dengan ekspektasi hipotesis-hipotesis/model pra-estimasi, dan didukung oleh postulat/teori yang relevan.
2. *Accuracy of the Estimates of the Parameters*/Keakuratan Estimasi Parameter; Apakah parameter hipotesis/model pasca-estimasi akurat atau bersifat tidak bias, yang ditandai dengan angka probabilitas kesalahan statistik (p-value) yang rendah, dimana p-value ( $\alpha = 0,05$ ).
3. *Explanatory Ability*/Kemampuan Menjelaskan; Apakah model pasca-estimasi memiliki kemampuan menjelaskan keterkaitan antar fenomena ekonomi yang ditandai dengan *standard error of estimations* (SE) yang rendah, dimana SE lebih kecil daripada  $\frac{1}{2}$  kali nilai mutlak koefisien regresinya ( $SE < 1/2b_{ij}$ ).
4. *Forecasting Ability*/Kemampuan Memprediksi; Apakah model pasca-estimasi memiliki kemampuan prediksi yang ditandai dengan koefisien determinasi yang tinggi, dimana  $R^2 > 0,50$ .

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Karawang Saat ini**

Kabupaten Karawang termasuk dalam wilayah pantai utara pulau Jawa dengan luas wilayah 1.753,27 km<sup>2</sup> atau 175.327 hektar, merupakan daerah yang luasnya 3,73% dari luas Propinsi Jawa Barat, serta memiliki luas laut 4 mil x 57 km. Letak geografis Kabupaten Karawang berbatasan dengan:

- Laut Jawa di sebelah utara
- Kabupaten Purwakarta di sebelah Tenggara
- Kabupaten Subang di sebelah Timur
- Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur di sebelah Selatan
- Kabupaten Bekasi di sebelah Barat.<sup>14</sup>

Dalam konteks pendidikan Kabupaten Karawang merupakan daerah penyangga Ibu Kota Jakarta, yang memiliki arti penting dalam pembangunan nasional. Perkembangan madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Karawang dimulai sejak tahun 1976, seiring dengan dibentuknya Kantor Perwakilan Departemen Agama.

Pada tahun 2013 Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Karawang memiliki 808 ruang kelas dengan jumlah siswa 22.521. dengan keadaan itu ratio kelas dengan murid sangat tidak memadai.<sup>15</sup>

#### **B. Analisis Data**

##### **1. Analisis Deskriptif**

Analisis terhadap data kuesioner yang menyangkut dengan variabel bebas dan variabel terikat adalah sebagai berikut :

##### **a. Deskripsi Variabel Partisipasi Masyarakat ( X<sub>1</sub> )**

Berdasarkan data persepsi kepala madrasah terhadap kontribusi masyarakat dalam pengembangan madrasah ibtidaiyah adalah sebagai berikut :

##### **1) Item nomor 1**

Sebanyak 51 kepala madrasah atau 49,04% menjawab sangat setuju, yang menjawab setuju sebanyak 39 kepala madrasah atau 37,50%, sebanyak 9 kepala madrasah atau 8,65% menjawab ragu-ragu, 5 kepala madrasah atau 4,81% menjawab tidak setuju, dan tidak ada kepala madrasah menjawab sangat tidak setuju. Data di atas menunjukkan bahwa 86,54% kepala madrasah menyatakan bahwa masyarakat berpartisipasi memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan madrasah (item nomor 1).

##### **2) Item nomor 2**

Sebanyak 45 kepala madrasah atau 43,27% menjawab sangat setuju, yang menjawab setuju sebanyak 52 kepala madrasah atau 50,00%, sebanyak 6 Kepala madrasah atau 5,77% menjawab ragu-ragu, 1 Kepala madrasah atau 0,96% menjawab tidak setuju, dan tidak ada Kepala madrasah menjawab sangat tidak setuju. Data di atas menunjukkan bahwa 93,27% Kepala madrasah menyatakan bahwa masyarakat berpartisipasi memberikan sumbangan pemikiran dan tenaganya dalam pengembangan madrasah. (item nomor 2).

### **3) Item nomor 3**

Sebanyak 17 Kepala madrasah atau 16,35% menjawab sangat setuju, yang menjawab setuju sebanyak 68 Kepala madrasah atau 65,38%, sebanyak 15 Kepala madrasah atau 14,42% menjawab ragu-ragu, 4 Kepala madrasah atau 3,85% menjawab tidak setuju, dan tidak ada Kepala madrasah menjawab sangat tidak setuju. Data di atas menunjukkan bahwa 86,54% Kepala madrasah menyatakan bahwa masyarakat bergotong royong secara fisik dalam pengembangan madrasah. (item nomor 3).

### **4) Item nomor 4**

Sebanyak 23 Kepala madrasah atau 22,12% menjawab sangat setuju, yang menjawab setuju sebanyak 49 Kepala madrasah atau 47,12%, sebanyak 28 Kepala madrasah atau 26,92% menjawab ragu-ragu, 4 Kepala madrasah atau 3,85% menjawab tidak setuju, dan tidak ada Kepala madrasah menjawab sangat tidak setuju. Data di atas menunjukkan bahwa 69,24% Kepala madrasah menyatakan bahwa masyarakat yang memiliki keahlian, berpartisipasi memberikan sumbangan dalam pengembangan madrasah. (item nomor 4).

### **5) Item nomor 5**

Ada 22,12% Kepala madrasah menjawab sangat setuju, Kepala madrasah yang menjawab setuju ada 47,12% , ada 26,92 % Kepala madrasah menjawab ragu-ragu, ada 3,85% Kepala madrasah yang menjawab tidak setuju, dan tidak ada Kepala madrasah menjawab sangat tidak setuju. Data di atas menunjukkan bahwa 69,24% Kepala madrasah menyatakan bahwa masyarakat berpartisipasi memberikan sumbangan dalam bentuk barang dalam upaya pengembangan madrasah. (item nomor 5).

### **6) Item nomor 6**

Ada 17,31% Kepala madrasah menjawab sangat setuju, Kepala madrasah yang menjawab setuju ada 31,73% , ada 34,62 % Kepala madrasah menjawab ragu-ragu, ada 12,50% Kepala madrasah yang menjawab tidak setuju, dan ada 3,85% Kepala madrasah yang menjawab sangat tidak setuju. Data di atas menunjukkan bahwa 49,04% Kepala madrasah menyatakan bahwa masyarakat Partisipasi masyarakat sudah sesuai dengan arah kebijakan madrasah. (item nomor 6)

### **7) Item nomor 7**

Ada 15,38% Kepala madrasah menjawab sangat setuju, Kepala madrasah yang menjawab setuju ada 46,15% , ada 28,85% Kepala madrasah menjawab ragu-ragu, ada 8,65% Kepala madrasah yang menjawab tidak setuju, dan ada 0,96% Kepala madrasah yang menjawab sangat tidak setuju. Data di atas menunjukkan bahwa 61,53% kepala madrasah menyatakan bahwa partisipasi masyarakat yang diterima oleh madrasah sudah membantu dalam efisiensi pendidikan. (item nomor 7)

**8) Item nomor 8**

Ada 10,58% Kepala madrasah menjawab sangat setuju, Kepala madrasah yang menjawab setuju ada 47,12% , ada 39,42% Kepala madrasah menjawab ragu-ragu, ada 2,88% Kepala madrasah yang menjawab tidak setuju, dan ada 0% Kepala madrasah yang menjawab sangat tidak setuju. Data di atas menunjukkan bahwa 57,70% Kepala madrasah menyatakan bahwa partisipasi masyarakat selama ini dapat meningkatkan pengalaman dalam pengembangan madrasah. (item nomor 8)

**9) Item nomor 9**

12,50% Kepala madrasah menjawab sangat setuju, Kepala madrasah yang menjawab setuju ada 45,19% , ada 29,81% Kepala madrasah menjawab ragu-ragu, ada 11,54% Kepala madrasah yang menjawab tidak setuju, dan ada 0,96% Kepala madrasah yang menjawab sangat tidak setuju. Data di atas menunjukkan bahwa 57,69% Kepala madrasah menyatakan bahwa partisipasi masyarakat yang diterima madrasah selama ini telah dapat meningkatkan mutu pendidikan. (item nomor 9)

**10) Item nomor 10**

Ada 12,50% Kepala madrasah menjawab sangat setuju, Kepala madrasah yang menjawab setuju ada 50,96% , ada 27,88% Kepala madrasah menjawab ragu-ragu, ada 8,65% Kepala madrasah yang menjawab tidak setuju, dan 0% Kepala madrasah yang menjawab sangat tidak setuju. Data di atas menunjukkan bahwa 63,46% Kepala madrasah menyatakan bahwa partisipasi masyarakat yang diterima madrasah selama ini telah dapat membantu memudahkan pencapaian tujuan madrasah. (item nomor 10)

**11) Item nomor 11**

Ada 20,19% Kepala madrasah menjawab sangat setuju, Kepala madrasah yang menjawab setuju ada 41,35%, ada 28,85% Kepala madrasah menjawab ragu-ragu, ada 9,62% Kepala madrasah yang menjawab tidak setuju, dan tidak ada kepala madrasah yang menjawab sangat tidak setuju. Data di atas menunjukkan bahwa 61,54% Kepala madrasah menyatakan bahwa madrasah sudah membuat perencanaan mengenai Pendidikan berbasis masyarakat. (item nomor 11)

**12) Item nomor 12**

Ada 13,46% Kepala madrasah menjawab sangat setuju, Kepala madrasah yang menjawab setuju ada 48,08% , ada 31,73 % Kepala madrasah menjawab ragu-ragu, ada 6,73% Kepala madrasah yang menjawab tidak setuju, dan 0% Kepala madrasah yang menjawab sangat tidak setuju. Data di atas menunjukkan bahwa 61,54% Kepala

madrasah menyatakan bahwa Pendidikan berbasis masyarakat sudah menjadi program sekolah saat ini. (item nomor 12)

**13) Item nomor 13**

Ada 12,50% Kepala madrasah menjawab sangat setuju, Kepala madrasah yang menjawab setuju ada 48,08% , ada 29,81% Kepala madrasah menjawab ragu-ragu, ada 9,62% Kepala madrasah yang menjawab tidak setuju, dan 0% Kepala madrasah yang menjawab sangat tidak setuju. Data di atas menunjukkan bahwa 60,58% Kepala madrasah menyatakan bahwa Pendidikan berbasis masyarakat saat ini sudah dapat meningkatkan mutu madrasah. (item nomor 13)

**14) Item nomor 14**

Ada 29,81% Kepala madrasah menjawab sangat setuju, Kepala madrasah yang menjawab setuju ada 44,23% , ada 25,00% Kepala madrasah menjawab ragu-ragu, ada 0,96% Kepala madrasah yang menjawab tidak setuju, dan 0% Kepala madrasah yang menjawab sangat tidak setuju. Data di atas menunjukkan bahwa 74,04% Kepala madrasah menyatakan bahwa Pendidikan berbasis masyarakat yang diterapkan selama ini dapat memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama. (item nomor 14)

**15) Item nomor 15**

Ada 12,50% Kepala madrasah menjawab sangat setuju, Kepala madrasah yang menjawab setuju ada 57,69% , ada 27,88% Kepala madrasah menjawab ragu-ragu, ada 1,92% Kepala madrasah yang menjawab tidak setuju, dan 0% Kepala madrasah yang menjawab sangat tidak setuju. Data di atas menunjukkan bahwa 70,38% Kepala madrasah menyatakan bahwa Pendidikan berbasis masyarakat turut membantu dalam pelaksanaan dan evaluasi madrasah selama ini.(item nomor 15)

**b. Deskripsi Variabel Pendanaan ( X2 )**

**1) Item nomor 16**

Ada 33,65% Kepala madrasah menjawab sangat setuju, Kepala madrasah yang menjawab setuju ada 46,15% , ada 19,23% Kepala madrasah menjawab ragu-ragu, ada 0,96% Kepala madrasah yang menjawab tidak setuju, dan 0% Kepala madrasah yang menjawab sangat tidak setuju. Data di atas menunjukkan bahwa 79,80% Kepala madrasah menyatakan bahwa Sumber dana dari masyarakat telah dapat membantu kelancaran penyelenggaraan pendidikan di madrasah.(item nomor 16)

**2) Item nomor 17**

Ada 18,27% Kepala madrasah menjawab sangat setuju, Kepala madrasah yang menjawab setuju ada 45,19%, ada 33,65% Kepala madrasah menjawab ragu-ragu, ada 2,88% Kepala madrasah yang menjawab tidak setuju, dan 0% Kepala madrasah yang menjawab sangat tidak setuju. Data di atas menunjukkan bahwa 63,46% Kepala madrasah menyatakan bahwa Sumber dana bantuan pemerintah pusat (BOS) dapat membantu kelancaran penyelenggaraan pendidikan di madrasah.(item nomor 17)

**3) Item nomor 18**

Ada 11,54% Kepala madrasah menjawab sangat setuju, Kepala madrasah yang menjawab setuju ada 42,31% , ada 35,58% Kepala madrasah menjawab ragu-ragu, ada 8,65% Kepala madrasah yang menjawab tidak setuju, dan 1,92% Kepala madrasah yang menjawab sangat tidak setuju. Data di atas menunjukkan bahwa 53,85% Kepala madrasah menyatakan bahwa Sumber dana bantuan pemerintah provinsi telah dapat membantu kelancaran penyelenggaraan pendidikan di madrasah.(item nomor 18)

**4) Item nomor 19**

Ada 0,96% Kepala madrasah menjawab sangat setuju, Kepala madrasah yang menjawab setuju ada 17,31% , ada 25,96% Kepala madrasah menjawab ragu-ragu, ada 37,50% Kepala madrasah yang menjawab tidak setuju, dan 18,27% Kepala madrasah yang menjawab sangat tidak setuju. Data di atas menunjukkan bahwa 18,27% Kepala madrasah menyatakan bahwa Sumber dana bantuan pemerintah kabupaten telah dapat membantu kelancaran penyelenggaraan pendidikan di madrasah.(item nomor 19)

**5) Item nomor 20**

Ada 0,96% Kepala madrasah menjawab sangat setuju, Kepala madrasah yang menjawab setuju ada 18,27% , ada 36,54% Kepala madrasah menjawab ragu-ragu, ada 31,73% Kepala madrasah yang menjawab tidak setuju, dan 12,50% Kepala madrasah yang menjawab sangat tidak setuju. Data di atas menunjukkan bahwa 19,23% Kepala madrasah menyatakan bahwa Sumber dana dari sumber-sumber yang tidak mengikat telah dapat membantu kelancaran penyelenggaraan pendidikan di madrasah.(item nomor 20)

**6) Item nomor 21**

Ada 4,81% Kepala madrasah menjawab sangat setuju, Kepala madrasah yang menjawab setuju ada 28,85% , ada 39,42% Kepala madrasah menjawab ragu-ragu, ada 23,08% Kepala madrasah yang menjawab tidak setuju, dan 3,85% Kepala madrasah yang menjawab sangat tidak setuju. Data di atas menunjukkan bahwa 33,66% Kepala madrasah menyatakan bahwa Alokasi dana untuk biaya investasi lahan sudah mencukupi.(item nomor 21)

**7) Item nomor 22**

Ada 1,92% Kepala madrasah menjawab sangat setuju, Kepala madrasah yang menjawab setuju ada 20,19% , ada 48,08% Kepala madrasah menjawab ragu-ragu, ada 21,15% Kepala madrasah yang menjawab tidak setuju, dan 8,65% Kepala madrasah yang menjawab sangat tidak setuju. Data di atas menunjukkan bahwa 22,11% Kepala madrasah menyatakan bahwa Alokasi dana untuk biaya investasi nonlahan (sarana dan Prasarana) sudah mencukupi.(item nomor 22)

**8) Item nomor 23**

Ada 0% Kepala madrasah menjawab sangat setuju, Kepala madrasah yang menjawab setuju ada 23,08% , ada 43,27% Kepala madrasah menjawab ragu-ragu, ada 27,88% Kepala madrasah yang menjawab tidak setuju, dan 0,58% Kepala madrasah yang menjawab sangat tidak setuju. Data di atas menunjukkan bahwa 23,08% Kepala madrasah menyatakan bahwa Alokasi dana untuk biaya operasi personalia sudah mencukupi.(item nomor 23)

**9) Item nomor 24**

Ada 13,46% Kepala madrasah menjawab sangat setuju, Kepala madrasah yang menjawab setuju ada 68,27% , ada 16,35% Kepala madrasah menjawab ragu-ragu, ada 1,92% Kepala madrasah yang menjawab tidak setuju, dan 0% Kepala madrasah yang menjawab sangat tidak setuju. Data di atas menunjukkan bahwa 70,19% Kepala madrasah menyatakan bahwa Alokasi dana untuk biaya operasi non personalia sudah mencukupi.(item nomor 24)

**10) Item nomor 25**

Ada 25,96% Kepala madrasah menjawab sangat setuju, Kepala madrasah yang menjawab setuju ada 59,62% , ada 12,50% Kepala madrasah menjawab ragu-ragu, ada 1,92% Kepala madrasah yang menjawab tidak setuju, dan 0% Kepala madrasah yang menjawab sangat tidak setuju. Data di atas menunjukkan bahwa 85,58% Kepala madrasah menyatakan bahwa Alokasi dana untuk biaya bantuan pendidikan sudah mencukupi.(item nomor 25)

**11) Item nomor 26**

Ada 21,15% Kepala madrasah menjawab sangat setuju, Kepala madrasah yang menjawab setuju ada 51,92% , ada 23,08% Kepala madrasah menjawab ragu-ragu, ada 3,85% Kepala madrasah yang menjawab tidak setuju, dan 0% Kepala madrasah yang menjawab sangat tidak setuju. Data di atas menunjukkan bahwa 73,07% Kepala madrasah menyatakan bahwa Alokasi dana biaya untuk beasiswa sudah mencukupi.(item nomor 26)

**12) Item nomor 27**

Ada 22,12% Kepala madrasah menjawab sangat setuju, Kepala madrasah yang menjawab setuju ada 46,15% , ada 28,85% Kepala madrasah menjawab ragu-ragu, ada 2,88% Kepala madrasah yang menjawab tidak setuju, dan 0% Kepala madrasah yang menjawab sangat tidak setuju. Data di atas menunjukkan bahwa 68,27% Kepala madrasah menyatakan bahwa Pertanggungjawaban pendanaan sudah mengacu pada prinsip akuntabilitas sesuai dengan aturan yang berlaku.(item nomor 27)

**13) Item nomor 28**

Ada 13,46% Kepala madrasah menjawab sangat setuju, Kepala madrasah yang menjawab setuju ada 58,65% , ada 25,00% Kepala madrasah menjawab ragu-ragu, ada 2,88% Kepala madrasah yang menjawab tidak setuju, dan 0% Kepala madrasah yang menjawab sangat tidak setuju. Data di atas menunjukkan bahwa 72,11% Kepala

madrasah menyatakan bahwa Pertanggungjawaban pendanaan sudah mengacu pada prinsip transparansi sesuai dengan aturan yang berlaku.(item nomor 28)

**14) Item nomor 29**

Ada 37,50% Kepala madrasah menjawab sangat setuju, Kepala madrasah yang menjawab setuju ada 47,12% , ada 12,50% Kepala madrasah menjawab ragu-ragu, ada 2,88% Kepala madrasah yang menjawab tidak setuju, dan 0% Kepala madrasah yang menjawab sangat tidak setuju. Data di atas menunjukkan bahwa 84,62% Kepala madrasah menyatakan bahwa Prinsip efisiensi pembiayaan saat ini sudah dapat dilaksanakan secara tepat.(item nomor 29)

**15) Item nomor 30**

Ada 12,50% Kepala madrasah menjawab sangat setuju, Kepala madrasah yang menjawab setuju ada 57,69% , ada 27,88% Kepala madrasah menjawab ragu-ragu, ada 1,92% Kepala madrasah yang menjawab tidak setuju, dan 0% Kepala madrasah yang menjawab sangat tidak setuju. Data di atas menunjukkan bahwa 70,19% Kepala madrasah menyatakan bahwa Efektivitas pembiayaan saat ini sudah tercapai secara tepat.(item nomor 30)

**16) Item nomor 31**

Ada 22,12% Kepala madrasah menjawab sangat setuju, Kepala madrasah yang menjawab setuju ada 46,15%, ada 28,85% Kepala madrasah menjawab ragu-ragu, ada 2,88% Kepala madrasah yang menjawab tidak setuju, dan 0% Kepala madrasah yang menjawab sangat tidak setuju. Data di atas menunjukkan bahwa 68,27% Kepala madrasah menyatakan bahwa Sistem pembiayaan sudah menggunakan akses keberadilan.(item nomor 31)

**17) Item nomor 32**

Ada 13,46% Kepala madrasah menjawab sangat setuju, Kepala madrasah yang menjawab setuju ada 58,65% , ada 25,00% Kepala madrasah menjawab ragu-ragu, ada 2,88% Kepala madrasah yang menjawab tidak setuju, dan 0% Kepala madrasah yang menjawab sangat tidak setuju. Data di atas menunjukkan bahwa 72,11% Kepala madrasah menyatakan bahwa Waktu pelaporan pertanggung jawaban keuangan sudah tepat waktu.(item nomor 32)

**c. Daya Tampung ( X3 )**

**1) Item nomor 33**

Sebanyak 30 Kepala madrasah atau 28,85% menjawab sangat setuju, yang menjawab setuju sebanyak 24 Kepala madrasah atau 23,08%, sebanyak 26 Kepala madrasah atau 25,00% menjawab ragu-ragu, 15 Kepala madrasah atau 14,42% menjawab tidak setuju, dan 9 Kepala madrasah atau 8,65% menjawab sangat tidak setuju. Data di atas menunjukkan bahwa 51,93% Kepala madrasah menyatakan bahwa Madrasah memiliki Ruang Kelas Belajar yang mencukupi. (item nomor 33)

**2) Item nomor 34**

Sebanyak 23 Kepala madrasah atau 22,12% menjawab sangat setuju, yang menjawab setuju sebanyak 20 Kepala madrasah atau 19,23%, sebanyak 24 Kepala madrasah atau 23,08% menjawab ragu-ragu, 21 Kepala madrasah atau 20,19% menjawab tidak setuju, dan 16 Kepala madrasah atau 15,38% menjawab sangat tidak setuju. Data di atas menunjukkan bahwa 41,35% Kepala madrasah menyatakan bahwa Madrasah memiliki fasilitas pendukung PBM (meubeler, laboratorium, perpustakaan) dengan luas sesuai dengan aturan (item nomor 34)

### **3) Item nomor 35**

Sebanyak 14 Kepala madrasah atau 13,46% menjawab sangat setuju, yang menjawab setuju sebanyak 22 Kepala madrasah atau 21,15%, sebanyak 27 Kepala madrasah atau 25,96% menjawab ragu-ragu, 32 Kepala madrasah atau 30,77% menjawab tidak setuju, dan 9 Kepala madrasah atau 8,65% menjawab sangat tidak setuju. Data di atas menunjukkan bahwa 34,61% Kepala madrasah menyatakan bahwa Madrasah memiliki ruang administrasi dengan luas yang sesuai dengan aturan. (item nomor 35)

### **4) Item nomor 36**

Sebanyak 14 Kepala madrasah atau 13,46% menjawab sangat setuju, yang menjawab setuju sebanyak 26 Kepala madrasah atau 25,00%, sebanyak 29 Kepala madrasah atau 27,88% menjawab ragu-ragu, 26 Kepala madrasah atau 25,00% menjawab tidak setuju, dan 9 Kepala madrasah atau 8,65% menjawab sangat tidak setuju. Data di atas menunjukkan bahwa 38,46% Kepala madrasah menyatakan bahwa Madrasah memiliki ruang kepala dan wakil kepala sekolah dengan luas yang sesuai dengan aturan. (item nomor 36)

### **5) Item nomor 37**

Sebanyak 10 Kepala madrasah atau 9,62% menjawab sangat setuju, yang menjawab setuju sebanyak 32 Kepala madrasah atau 30,77%, sebanyak 43 Kepala madrasah atau 41,35,00% menjawab ragu-ragu, 18 Kepala madrasah atau 17,31% menjawab tidak setuju, dan 1 Kepala madrasah atau 0,96% menjawab sangat tidak setuju. Data di atas menunjukkan bahwa 40,39% Kepala madrasah menyatakan bahwa Madrasah memiliki ruang guru dengan luas yang sesuai dengan aturan. (item nomor 37)

### **6) Item nomor 38**

Sebanyak 12 Kepala madrasah atau 11,54% menjawab sangat setuju, yang menjawab setuju sebanyak 28 Kepala madrasah atau 26,92%, sebanyak 34 Kepala madrasah atau 32,69% menjawab ragu-ragu, 25 Kepala madrasah atau 24,04% menjawab tidak setuju, dan 5 Kepala madrasah atau 4,81% menjawab sangat tidak setuju. Data di atas menunjukkan bahwa 38,46% Kepala madrasah menyatakan

bahwa Madrasah memiliki sarana penunjang lainnya (lapang olah raga, sarana ibadah, halaman upacara, dll) dengan ukuran yang memadai. (item nomor 38)

**7) Item nomor 39**

Sebanyak 35 Kepala madrasah atau 33,65% menjawab sangat setuju, yang menjawab setuju sebanyak 43 Kepala madrasah atau 41,35%, sebanyak 19 Kepala madrasah atau 18,27% menjawab ragu-ragu, 5 Kepala madrasah atau 4,81% menjawab tidak setuju, dan 2 Kepala madrasah atau 1,92% menjawab sangat tidak setuju. Data di atas menunjukkan bahwa 75,00% Kepala madrasah menyatakan bahwa Madrasah memiliki jumlah tenaga pendidik sesuai dengan kebutuhan. (item nomor 39)

**8) Item nomor 40**

Sebanyak 36 Kepala madrasah atau 34,62% menjawab sangat setuju, yang menjawab setuju sebanyak 36 Kepala madrasah atau 34,62%, sebanyak 20 Kepala madrasah atau 19,23% menjawab ragu-ragu, 11 Kepala madrasah atau 10,58% menjawab tidak setuju, dan 1 Kepala madrasah atau 0,96% menjawab sangat tidak setuju. Data di atas menunjukkan bahwa 69,24% Kepala madrasah menyatakan bahwa Madrasah memiliki jumlah tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan (item nomor 40)

**9) Item nomor 41**

Sebanyak 26 Kepala madrasah atau 25,00% menjawab sangat setuju, yang menjawab setuju sebanyak 37 Kepala madrasah atau 35,58%, sebanyak 32 Kepala madrasah atau 30,77% menjawab ragu-ragu, 7 Kepala madrasah atau 6,73% menjawab tidak setuju, dan 2 Kepala madrasah atau 1,92% menjawab sangat tidak setuju. Data di atas menunjukkan bahwa 60,58% Kepala madrasah menyatakan bahwa Rasio guru dengan peserta didik sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. (item nomor 41)

**10) Item nomor 42**

Sebanyak 26 Kepala madrasah atau 25,00% menjawab sangat setuju, yang menjawab setuju sebanyak 35 Kepala madrasah atau 33,65%, sebanyak 30 Kepala madrasah atau 28,85% menjawab ragu-ragu, 11 Kepala madrasah atau 10,58% menjawab tidak setuju, dan 2 Kepala madrasah atau 1,92% menjawab sangat tidak setuju. Data di atas menunjukkan bahwa 58,65% Kepala madrasah menyatakan bahwa Rasio tenaga kependidikan dengan jumlah siswa sudah sesuai dengan aturan yang berlaku (item nomor 42)

**d. Deskripsi variabel pelayanan (Y)**

Distribusi tanggapan Kepala madrasah terhadap kualifikasi tenaga pendidik dengan menggunakan empat indikator yaitu tingkat pendidikan tenaga pendidik, Pengalaman tenaga pendidik dalam mengajar, Kesesuaian tingkat pendidikan tenaga pendidik dengan mata pelajaran yang diampu, dan Kedisiplinan waktu tenaga pendidik dalam mengajar menunjukkan bahwa Kepala madrasah berpendapat baik

terhadap kualifikasi tenaga pendidik. Hal ini terlihat dari data di atas menunjukkan skala 4 sebanyak 59,86% yang merupakan jawaban mayoritas Kepala madrasah. Secara lebih lengkap tanggapan Kepala madrasah setiap item adalah sebagai berikut :

**1) Item nomor 43**

Sebanyak 31 Kepala madrasah atau 29,81% menjawab sangat baik, yang menjawab baik sebanyak 55 Kepala madrasah atau 52,88%, sebanyak 18 Kepala madrasah atau 17,31% menjawab cukup baik, sedangkan tidak ada Kepala madrasah yang menjawab tidak baik dan sangat tidak baik. Data di atas menunjukkan bahwa 82,69% Kepala madrasah menyatakan bahwa Kualifikasi tingkat pendidikan tenaga pendidik memenuhi (Item nomor 43)

**2) Item nomor 44**

Sebanyak 14 Kepala madrasah atau 13,46% menjawab sangat baik, yang menjawab baik sebanyak 73 Kepala madrasah atau 70,19%, sebanyak 17 Kepala madrasah atau 16,35% menjawab cukup baik, sedangkan tidak ada Kepala madrasah menjawab tidak baik dan sangat tidak baik Data di atas menunjukkan bahwa 83,65% Kepala madrasah menyatakan bahwa Pengalaman tenaga pendidik dalam mengajar memadai. (Item nomor 44)

**3) Item nomor 45**

Sebanyak 15 Kepala madrasah atau 14,42% menjawab sangat baik, yang menjawab baik sebanyak 66 Kepala madrasah atau 63,46%, sebanyak 21 Kepala madrasah atau 20,19% menjawab cukup baik, 2 Kepala madrasah atau 1,92% menjawab tidak baik, dan tidak ada Kepala madrasah menjawab sangat tidak baik. Data di atas menunjukkan bahwa 77,88% Kepala madrasah menyatakan bahwa ada Kesesuaian tingkat pendidikan tenaga pendidik dengan mata pelajaran yang diampu (Item nomor 45)

**4) Item nomor 46**

Sebanyak 22 Kepala madrasah atau 21,15% menjawab sangat baik, yang menjawab baik sebanyak 55 Kepala madrasah atau 52,88%, sebanyak 26 Kepala madrasah atau 25,00% menjawab cukup baik, 1 Kepala madrasah atau 0,96% menjawab tidak baik, dan tidak ada Kepala madrasah menjawab sangat tidak baik. Data di atas menunjukkan bahwa 74,03% Kepala madrasah menyatakan bahwa Ke-disiplinan waktu tenaga pendidik dalam mengajar baik (Item nomor 46)

**5) Item nomor 47**

Sebanyak 9 Kepala madrasah atau 8,65% menjawab sangat baik, yang menjawab baik sebanyak 72 Kepala madrasah atau 69,23%, sebanyak 22 Kepala madrasah atau 21,15% menjawab cukup baik, 1 Kepala madrasah atau 0,96% menjawab tidak baik, dan tidak ada Kepala madrasah yang menjawab sangat tidak baik. Data di atas menunjukkan bahwa 77,88% Kepala madrasah menyatakan bahwa Tingkat pendidikan tenaga kependidikan memenuhi. (Item nomor 47)

**6) Item nomor 48**

Sebanyak 9 Kepala madrasah atau 8,65% menjawab sangat baik, yang menjawab baik sebanyak 60 Kepala madrasah atau 57,69%, sebanyak 33 Kepala madrasah atau 31,73% menjawab cukup baik, 2 Kepala madrasah atau 1,92% menjawab tidak baik, dan tidak ada Kepala madrasah menjawab sangat tidak baik. Data di atas menunjukkan bahwa 66,34% Kepala madrasah menyatakan bahwa Pengalaman tenaga kependidikan memadai (Item nomor 48)

**7) Item nomor 49**

Sebanyak 16 Kepala madrasah atau 15,38% menjawab sangat baik, yang menjawab baik sebanyak 71 Kepala madrasah atau 68,27%, sebanyak 13 Kepala madrasah atau 12,50% menjawab cukup baik, 4 Kepala madrasah atau 3,85% menjawab tidak baik, dan tidak ada Kepala madrasah menjawab sangat tidak baik. Data di atas menunjukkan bahwa 83,65% Kepala madrasah menyatakan bahwa Kualifikasi tingkat pendidikan tenaga kependidikan memenuhi (Item nomor 49)

**8) Item nomor 50**

Sebanyak 11 Kepala madrasah atau 10,58% menjawab sangat baik, yang menjawab baik sebanyak 71 Kepala madrasah atau 68,27%, sebanyak 20 Kepala madrasah atau 19,23% menjawab cukup baik, 2 Kepala madrasah atau 1,92% menjawab tidak baik, dan tidak ada Kepala madrasah menjawab sangat tidak baik. Data di atas menunjukkan bahwa 78,85% Kepala madrasah menyatakan bahwa Kedisiplinan waktu tenaga kependidikan dalam menjalankan tugas baik. (Item nomor 50)

**9) Item nomor 51**

Sebanyak 7 Kepala madrasah atau 6,73% menjawab sangat baik, yang menjawab baik sebanyak 49 Kepala madrasah atau 47,12%, sebanyak 43 Kepala madrasah atau 41,35% menjawab cukup baik, 5 Kepala madrasah atau 4,81% menjawab tidak baik, dan tidak ada Kepala madrasah menjawab sangat tidak baik. Data di atas menunjukkan bahwa 53,85% Kepala madrasah menyatakan bahwa Kedisiplinan waktu tenaga kependidikan dalam menjalankan tugas tinggi (Item nomor 51)

**10) Item nomor 52**

Sebanyak 11 Kepala madrasah atau 10,58% menjawab sangat baik, yang menjawab baik sebanyak 39 Kepala madrasah atau 37,50%, sebanyak 38 Kepala madrasah atau 36,54% menjawab cukup baik, 15 Kepala madrasah atau 14,42% menjawab tidak baik, dan 1 Kepala madrasah atau 0,96% menjawab sangat tidak baik. Data di atas menunjukkan bahwa 48,08% Kepala madrasah menyatakan bahwa Keadaan fisik ruangan belajar siswa baik (Item nomor 52)

**11) Item nomor 53**

Sebanyak 1 Kepala madrasah atau 0,96% menjawab sangat baik, yang menjawab baik sebanyak 36 Kepala madrasah atau 34,62%, sebanyak 58 Kepala madrasah atau 55,77% menjawab cukup baik, 9 Kepala madrasah atau 8,65%

menjawab tidak baik, dan tidak ada Kepala madrasah menjawab sangat tidak baik. Data di atas menunjukkan bahwa 35,58% Kepala madrasah menyatakan bahwa Keadaan fisik ruangan belajar siswa baik (Item nomor 53)

**12) Item nomor 54**

Sebanyak 7 Kepala madrasah atau 6,73% menjawab sangat baik, yang menjawab baik sebanyak 31 Kepala madrasah atau 29,81%, sebanyak 47 Kepala madrasah atau 45,19% menjawab cukup baik, 16 Kepala madrasah atau 15,38% menjawab tidak baik, dan 3 Kepala madrasah atau 2,88% menjawab sangat tidak baik. Data di atas menunjukkan bahwa 36,54% Kepala madrasah menyatakan bahwa Kondisi ruangan administrasi representatif (Item nomor 54)

**13) Item nomor 55**

Sebanyak 4 Kepala madrasah atau 3,85% menjawab sangat baik, yang menjawab baik sebanyak 33 Kepala madrasah atau 31,73%, sebanyak 44 Kepala madrasah atau 42,31% menjawab cukup baik, 18 Kepala madrasah atau 17,31% menjawab tidak baik, dan 5 Kepala madrasah atau 4,81% menjawab sangat tidak baik. Data di atas menunjukkan bahwa 35,58% Kepala madrasah menyatakan Kondisi peralatan pelayanan administrasi bagi siswa baik. (Item nomor 55).

**14) Item nomor 56**

Sebanyak 21 Kepala madrasah atau 20,19% menjawab sangat baik, yang menjawab baik sebanyak 45 Kepala madrasah atau 43,27%, sebanyak 26 Kepala madrasah atau 25,00% menjawab cukup baik, 9 Kepala madrasah atau 8,65% menjawab tidak baik, dan 3 Kepala madrasah atau menjawab 2,88% menjawab sangat tidak baik. Data di atas menunjukkan bahwa 63,46% Kepala madrasah menyatakan Jumlah dan Kelengkapan Buku di perpustakaan memadai (Item nomor 56)

**15) Item nomor 57**

Sebanyak 9 Kepala madrasah atau 8,65% menjawab sangat baik, yang menjawab baik sebanyak 32 Kepala madrasah atau 30,77%, sebanyak 36 Kepala madrasah atau 34,62% menjawab cukup baik, 19 Kepala madrasah atau 18,27% menjawab tidak baik, dan 8 Kepala madrasah atau 7,69% menjawab sangat tidak baik. Data di atas menunjukkan bahwa 39,42% Kepala madrasah menyatakan bahwa Madrasah melakukan seleksi penerimaan siswa baru berdasarkan pada usia calon peserta didik (Item nomor 57)

**16) Item nomor 58**

Sebanyak 5 Kepala madrasah atau 4,81% menjawab sangat baik, yang menjawab baik sebanyak 27 Kepala madrasah atau 25,96%, sebanyak 39 Kepala madrasah atau 37,50% menjawab cukup baik, 26 Kepala madrasah atau 25,00% menjawab tidak baik, dan 7 Kepala madrasah atau 6,73% menjawab sangat tidak baik. Data di atas menunjukkan bahwa 30,77% Kepala madrasah menyatakan bahwa Madrasah melakukan seleksi penerimaan siswa baru berdasarkan pada domisili calon peserta didik. (Item nomor 58)

**17) Item nomor 59**

Sebanyak 9 Kepala madrasah atau 8,65% menjawab sangat baik, yang menjawab baik sebanyak 36 Kepala madrasah atau 34,62%, sebanyak 42 Kepala madrasah atau 40,38% menjawab cukup baik, 14 Kepala madrasah atau 13,46% menjawab tidak baik, dan 3 Kepala madrasah atau 2,88% menjawab sangat tidak baik. Data di atas menunjukkan bahwa 43,27% Kepala madrasah menyatakan bahwa Madrasah melakukan seleksi penerimaan siswa baru berdasarkan pada kesiapan secarta akademis (harus lulus RA) calon peserta didik. (Item nomor 59)

**18) Item nomor 60**

Sebanyak 29 Kepala madrasah atau 27,88% menjawab sangat baik, yang menjawab baik sebanyak 49 Kepala madrasah atau 47,12%, sebanyak 22 Kepala madrasah atau 21,15% menjawab cukup baik, 4 Kepala madrasah atau 3,85% menjawab tidak baik, dan tidak ada Kepala madrasah menjawab sangat tidak baik. Data di atas menunjukkan bahwa 75,00% Kepala madrasah menyatakan bahwa Sebaran siswa tiap kelas disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. (Item nomor 60)

**C. Analisis dan Pembahasan**

Dari respon kepala madrasah terhadap item penelitian yang peneliti berikan, ada beberapa item yang perlu peneliti kritisi adapun item tersebut adalah:

1. Item nomor 3: Masyarakat bergotong royong secara fisik dalam pengembangan madrasah. Respon kepala madrasah yang menyatakan sangat setuju pada item ini hanya 17%, artinya sebagian besar kepala madrasah menganggap masyarakat kontribusinya masih relatif rendah dalam bergotong royong secara fisik dalam pengembangan madrasah. Pandangan kepala madrasah semacam ini seakan bertentangan dengan realita bahwa sebagian besar bahkan lebih dari 90% madrasah dikelola oleh swasta dalam hal ini oleh masyarakat. Jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) pada Tahun Pelajaran 2011-2012 sebanyak 1.686 lembaga (7,31%), sedangkan Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) sebanyak 21.385 lembaga (92,69%).<sup>16</sup> Kemungkinan persepsi kepala madrasah dalam kasus ini dipengaruhi oleh realita bahwa masyarakat akan mudah tergerak dalam pembangunan masjid dibandingkan dengan pembangunan sarana pendidikan (madrasah).
2. Item nomor 6: Partisipasi masyarakat sudah sesuai dengan arah kebijakan madrasah. Respon kepala madrasah terhadap item ini adalah hanya 17,31% yang menyatakan sangat setuju, artinya sebagian besar kepala madrasah menganggap bahwa partisipasi masyarakat belum sesuai dengan arah kebijakan madrasah. Kalau dilihat dari komposisi jumlah MIS (madrasah ibtidaiyah swasta) yang lebih dari 90%, sebenarnya partisipasi masyarakat sangat tinggi. Adapun banyak kepala madrasah yang menganggap bahwa partisipasi masyarakat belum sesuai dengan arah kebijakan madrasah disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: 1). Realita bahwa animo masyarakat untuk memasukkan anaknya belajar di madrasah relatif rendah. 2). Sebagian besar orang tua yang memasukkan anaknya belajar di madrasah

berasal dari kalangan ekonomi lemah, sekitar 78,6% berpenghasilan di bawah Rp. 500,000, sehingga kontribusi dalam membayar SPP (uang bulanan) juga sangat rendah dan banyak yang terlambat membayarnya.

3. Item nomor 7: Partisipasi masyarakat yang diterima oleh madrasah sudah membantu dalam efisiensi pendidikan. Terhadap item ini hanya 16% kepala madrasah yang menjawab sangat setuju, artinya persepsi sebagian besar kepala madrasah beranggapan bahwa partisipasi masyarakat belum membantu dalam efisiensi pendidikan di madrasah. Persepsi kepala madrasah ini disebabkan karena sebagian besar orang tua murid status ekonominya menengah ke bawah, dan tingkat pendidikannya juga relatif rendah, sehingga mereka sekedar menyekolahkan saja dan percaya 100% kepada pihak madrasah.
4. Item nomor 8: Partisipasi masyarakat selama ini dapat meningkatkan pengalaman dalam pengembangan madrasah. Terhadap item ini hanya 11% kepala madrasah yang menjawab sangat setuju, artinya persepsi sebagian besar kepala madrasah beranggapan bahwa partisipasi masyarakat belum dapat meningkatkan pengalaman dalam pengembangan madrasah. Persepsi kepala madrasah semacam ini tentu sangat terkait dengan item nomor 3, 6, dan 7.
5. Item 9: Partisipasi masyarakat yang diterima madrasah selama ini telah dapat meningkatkan mutu pendidikan. Terhadap item ini hanya 13% kepala madrasah yang menjawab sangat setuju, artinya persepsi sebagian besar kepala madrasah beranggapan bahwa partisipasi masyarakat belum dapat meningkatkan mutu pendidikan di madrasah. Persepsi ini sangat terkait dengan item nomor 7, sehingga sebagian besar orang tua murid pasif terhadap program yang dilakukan madrasah.
6. Item 10: Partisipasi masyarakat yang diterima madrasah selama ini telah dapat membantu memudahkan pencapaian tujuan madrasah. Terhadap item ini hanya 13% kepala madrasah yang menjawab sangat setuju, artinya persepsi sebagian besar kepala madrasah beranggapan bahwa partisipasi masyarakat belum dapat membantu memudahkan pencapaian tujuan madrasah. Persepsi kepala madrasah terhadap kondisi ini tentu terkait dengan item nomor 9, sehingga dengan kepasifan orang tua terhadap program madrasah menyebabkan madrasah sulit untuk mencapai tujuannya.
7. Item 12: Pendidikan berbasis masyarakat sudah menjadi program sekolah saat ini. Terhadap item ini hanya 14% kepala madrasah yang menjawab sangat setuju, artinya persepsi sebagian besar kepala madrasah beranggapan bahwa pendidikan berbasis masyarakat belum menjadi program madrasah. Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh faktor intern madrasah, yaitu adanya keterbatasan kualitas SDM yang ada pada madrasah, baik tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan. Untuk kepala MIN yang berpendidikan  $\leq$  S-1 ada 15,54%, sedangkan untuk kepala MIS yang S-1 ada berpendidikan  $\leq$  40,43%. 17
8. Item 13: Pendidikan berbasis masyarakat saat ini sudah dapat meningkatkan mutu madrasah. Terhadap item ini hanya 13% kepala madrasah yang menjawab sangat

setuju, artinya persepsi sebagian besar kepala madrasah beranggapan bahwa pendidikan berbasis masyarakat belum dapat meningkatkan mutu madrasah. Keadaan ini terkait dengan item nomor 12.

9. Item 15: Pendidikan berbasis masyarakat turut membantu dalam pelaksanaan dan evaluasi madrasah selama ini . Terhadap item ini hanya 13% kepala madrasah yang menjawab sangat setuju, artinya persepsi sebagian besar kepala madrasah beranggapan bahwa pendidikan berbasis masyarakat belum membantu dalam pelaksanaan dan evaluasi madrasah. Keadaan ini terkait dengan item nomor 6 dan 7.
10. Item 21: Alokasi dana untuk biaya investasi lahan sudah mencukupi. Terhadap item ini hanya 5% kepala madrasah yang menjawab sangat setuju, artinya persepsi sebagian besar kepala madrasah menyatakan bahwa alokasi dana untuk biaya investasi lahan belum mencukupi. Keadaan ini sangat bertolak belakang dengan realita bahwa sebagian besar lahan untuk pembangunan madrasah berasal dari masyarakat murni bahkan ada yang berupa tanah wakaf. Jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) pada Tahun Pelajaran 2011-2012 sebanyak 1.686 lembaga (7,31%),sedangkan Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) sebanyak 21.385 lembaga (92,69%)<sup>18</sup>
11. Item 22: Alokasi dana untuk biaya investasi non-lahan (sarana dan Prasarana) sudah mencukupi. Terhadap item ini hanya 2% kepala madrasah yang menjawab sangat setuju, artinya persepsi sebagian besar kepala madrasah menyatakan bahwa alokasi dana untuk sarana dan prasarana belum mencukupi. Keadaan ini kemungkinan disebabkan oleh tingkat partisipasi orang tua murid dalam pembayaran uang pangkal sangat rendah, sehingga wajar kepala madrasah beranggapan bahwa alokasi dana untur sarana dan prasarana belum mencukupi.
12. Item 27: Pertanggungjawaban pendanaan sudah mengacu pada prinsip akuntabilitas sesuai dengan aturan yang berlaku. Terhadap item ini hanya 22% kepala madrasah yang menjawab sangat setuju, artinya persepsi sebagian besar kepala madrasah menyatakan bahwa Pertanggungjawaban pendanaan belum mengacu pada prinsip akuntabilitas. Keadaan ini mungkin yang menyebabkan partisipasi masyarakat rendah terhadap pendidikan madrasah.
13. Item 28: Pertanggungjawaban pendanaan sudah mengacu pada prinsip transparansi sesuai dengan aturan yang berlaku. Terhadap item ini hanya 22% kepala madrasah yang menjawab sangat setuju, artinya persepsi sebagian besar kepala madrasah menyatakan bahwa Pertanggungjawaban pendanaan belum mengacu pada prinsip transparansi sesuai dengan aturan yang berlaku. Keadaan ini terjadi karena kepala MIN yang berpendidikan  $\leq$  S-1 ada 15,54%, sedangkan untuk kepala MIS yang berpendidikan  $\leq$  S-1 ada 40,43%. <sup>19</sup>
14. Item 29: Prinsip efisiensi pembiayaan saat ini sudah dapat dilaksanakan secara tepat. Terhadap item ini hanya 14 % kepala madrasah yang menjawab sangat setuju, artinya persepsi sebagian besar kepala madrasah menyatakan bahwa

Prinsip efisiensi pembiayaan saat ini belum dapat dilaksanakan secara tepat. Keadaan ini terkait dengan item 28.

15. Item 39: Madrasah memiliki jumlah tenaga pendidik sesuai dengan kebutuhan. Terhadap item ini hanya 35 % kepala madrasah yang menjawab sangat setuju, artinya persepsi sebagian besar kepala madrasah menyatakan bahwa Madrasah belum memiliki jumlah tenaga pendidik sesuai dengan kebutuhan.
16. Item 41: Rasio guru dengan peserta didik sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Terhadap item ini hanya 26% kepala madrasah yang menjawab sangat setuju, artinya persepsi sebagian besar kepala madrasah menyatakan bahwa Rasio guru dengan peserta didik belum sesuai dengan aturan yang berlaku. Data di Provinsi Jawa Barat tahun 2010 rasio guru dengan murid adalah 1 guru untuk 23,7 murid, padahal kondisi tahun 2004 data dari Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama rasio guru dengan murid sudah mencapai 1 guru untuk 20 murid. Karena itulah wajar bila sebagian besar kepala madrasah menyatakan bahwa rasio guru dengan murid belum memenuhi standar.
17. Item 43: Kualifikasi tingkat pendidikan tenaga pendidik. Berkaitan dengan kualifikasi tingkat pendidikan hanya 35% kepala madrasah yang menyatakan sangat baik, artinya sebagian besar kepala madrasah menyatakan bahwa kwalifikasi pendidikan guru di madrasah belum sesuai dengan standar yang berlaku. Data tahun 2010 di Provinsi Jawa Barat jumlah guru MI yang pendidikannya belum S-1 ada 18.643, sedangkan guru yang pendidikannya S-1 ke atas ada 4.810.20 Karena itu wajar bila sebagian besar kepala madrasah menyatakan bahwa kualifikasi tenaga pendidik belum sesuai dengan standar yang berlaku.
18. Item 45: Kesesuaian tingkat pendidikan tenaga pendidik dengan mata pelajaran yang diampu. Berkaitan dengan kesesuaian tingkat pendidikan tenaga pendidik dengan mata pelajaran yang diampu hanya 35% kepala madrasah yang menyatakan sangat baik, artinya sebagian besar kepala madrasah menyatakan bahwa belum ada kesesuaian tingkat pendidikan tenaga pendidik dengan mata pelajaran yang diampu. Keadaan ini tentunya sangat terkait dengan item nomor 43.
19. Item 56: Jumlah dan Kelengkapan Buku di perpustakaan. Hanya 21% kepala madrasah yang menyatakan jumlah dan kelengkapan buku di perpustakaan sangat memadai, artinya sebagian besar kepala madrasah menyatakan bahwa jumlah dan kelengkapan buku di perpustakaan belum memadai. Dalam Permendiknas No. 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar menyatakan bahwa setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi. Berkaitan dengan peraturan itu maka sebagian besar kepala madrasah memandang bahwa jumlah dan kelengkapan buku di perpustakaan belum memadai.

#### **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis data penelitian yang telah peneliti lakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Partisipasi masyarakat berpengaruh secara langsung kepada pendanaan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Karawang.
2. Pendanaan berpengaruh kepada daya tampung Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Karawang
3. Pendanaan berpengaruh terhadap pelayanan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Karawang
4. Partisipasi masyarakat berpengaruh secara langsung kepada daya tampung Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Karawang
5. Partisipasi masyarakat berpengaruh secara langsung kepada pelayanan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Karawang

---

#### **REFERENCES**

- [1] Lihat UUSPN NO 20 Tahun 2003 Bab I Pasal 1 ayat (1)
- [2] Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2005, hlm. 24
- [3] Zuhairini Dkk, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Bina Aksara, 1995, hlm. 2
- [4] H.A. Tilaar, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, Jakarta : Rineka Citra 2010, hlm.
- [5] QS.58: 11
- [6] Zaghlul Nazzar, *Nadharat fi Azimati atta'lim fil al-Muashir*, Maktabah Wahbah,2006, hlm..192
- [7] Maksum, *Madasah Sejarah & Perkembangannya*, Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 2001, hlm. 151
- [8] Wawancara dengan H.Sanyoto,S.Pd.I, staf Mapenda Kementerian Agama Kab.Karawang, 27 Maret 2013
- [9] Nazir, *Metode Penelitian*. 1988. Jakarta : Ghalia Indonesia
- [10] Singrimbun dan Effendi *metode Filsafat*, LP3S Jakarta 2008,hal 122 – 123
- [11] Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*,Remaja Rosda Kaya, Jakarta, 2000, halaman 61
- [12] Suharismi, Ibid halaman 174
- [13] Koutsoyiannis dalam Wirasasmita Ibid hal 29-30.
- [14] Lembaran Daerah Kabupaten Karawang NO. 2 2010 seri E Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2010.
- [15] Kantor Kemenag Seksi Mapenda Kabupaten Karawang.
- [16]<http://pendis.kemenag.go.id/file/dokumen/madrasahanalisis.pdf> diunduh pada 13 Januari 2014
- [17]<http://pendis.kemenag.go.id/file/dokumen/madrasahanalisis.pdf> diunduh pada 13 -01-2014
- [18]<http://pendis.kemenag.go.id/file/dokumen/madrasahanalisis.pdf> diunduh pada13 -01-2014
- [19]<http://pendis.kemenag.go.id/file/dokumen/madrasahanalisis.pdf> diunduh pada 13 Pebruari 2014
- [20]<http://pendis.kemenag.go.id/file/dokumen/madrasahanalisis.pdf> diunduh pada 13 Pebruari 2014